



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
**UNIT KERJA** : WAKIL PIMPINAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MUHAMMADIN.SE
2. Jabatan : WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG
3. NHK : 229459

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 16.535.000.000**

1. Tanah Seluas 16506 m2 di KAB / KOTA KOTA SINGKAWANG ,  
HASIL SENDIRI Rp. 1.650.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA  
SINGKAWANG , WARISAN Rp. 1.500.000.000
3. Tanah Seluas 11136 m2 di KAB / KOTA BENGKAYANG,  
WARISAN Rp. 1.100.000.000
4. Tanah Seluas 10218 m2 di KAB / KOTA BENGKAYANG,  
WARISAN Rp. 1.050.000.000
5. Tanah Seluas 284 m2 di KAB / KOTA KOTA SINGKAWANG ,  
WARISAN Rp. 290.000.000
6. Tanah Seluas 11238 m2 di KAB / KOTA SAMBAS, WARISAN Rp.  
1.650.000.000
7. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA SAMBAS, WARISAN Rp.  
3.000.000.000
8. Tanah Seluas 13800 m2 di KAB / KOTA SAMBAS, WARISAN Rp.  
2.070.000.000
9. Tanah Seluas 19500 m2 di KAB / KOTA SAMBAS, WARISAN Rp.  
2.900.000.000
10. Tanah Seluas 187 m2 di KAB / KOTA PONTIANAK, WARISAN Rp.  
1.000.000.000
11. Tanah Seluas 325 m2 di KAB / KOTA SAMBAS, WARISAN Rp.



325.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp.

80.000.000

1. MOBIL, HONDA CRV-VREI Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.

80.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp.

29.220.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp.

----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp.

17.897.116

**F. HARTA LAINNYA**

Rp.

----

**Sub Total**

Rp.

16.662.117.116

**III. HUTANG**

Rp.

850.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

15.812.117.116

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.